

Edukasi Hukum Pengelolaan Kawasan Perairan Secara Berkelanjutan

Abunawas

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

abu.nawas@fahukum.untan.ac.id

Abstrak

Pendidikan hukum mengenai pengelolaan kawasan perairan berkelanjutan pada remaja atau anak usia sekolah merupakan upaya strategis untuk membentuk generasi yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) edukasi hukum pengelolaan kawasan perairan secara berkelanjutan adalah untuk mensosialisasikan dan mengedukasi remaja tentang pentingnya kesadaran akan aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum lingkungan, anak-anak dapat mengembangkan karakter yang etis dan peka terhadap isu-isu ekologi, serta menghindari perilaku melanggar hukum. Mitra kegiatan ini adalah siswa sekolah SMPN 8 Kubu Raya yang berlokasi di kawasan pesisir Kecamatan Sungai Kakap Kubu Raya. Kegiatan dihadiri oleh 30 orang

DOI: <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i1.248>

*Correspondensi: Abunawas

Email: abu.nawas@fahukum.untan.ac.id

Received: 29-05-2024

Accepted: 02-07-2024

Published: 06-07-2024



Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright: © 2024 by the authors

mahasiswa, dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi ilmiah. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan pada awal dan akhir kegiatan dengan pemberian kuisisioner kepada peserta menunjukkan peningkatan persentase peserta dalam memahami materi pelatihan yang diberikan.

Kata kunci : edukasi, hukum, ekologi, SMPN 8 Kubu Raya

Abstract

Legal education regarding sustainable water area management for teenagers or school-aged children is a strategic effort to form a generation that is environmentally aware and responsible. The aim of community service activities (PKM) for legal education on sustainable management of marine areas is to socialize and educate teenagers about the importance of awareness of the rules governing the sustainable use of marine resources. With a deep understanding of environmental law, children can develop an ethical character and be sensitive to

ecological issues, and avoid unlawful behavior. The partners for this activity are students from SMPN 8 Kubu Raya which is located in the coastal area of Sungai Kakap Kubu Raya District. The activity was attended by 30 students, carried out using lecture and scientific discussion methods. Based on the evaluation of activities carried out at the beginning and end of the activity by giving questionnaires to participants, it showed an increase in the percentage of participants in understanding the training material provided.

Keywords: education, law, ecology, SMPN 8 Kubu Raya

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan perikanan laut berkelanjutan adalah pendekatan untuk mengelola sumber daya ekologi laut dengan cara yang menjamin kelangsungan hidup, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Pengelolaan perikanan laut berkelanjutan mencakup beberapa aspek penting seperti konservasi ekosistem terutama dalam melindungi dan memulihkan habitat laut serta menjamin keanekaragaman hayati tetap terjaga (Dharmawan & Sarjana, 2016). Ini termasuk langkah-

langkah seperti menetapkan kawasan konservasi laut dan memperkenalkan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kalimantan Barat dengan panjang garis pantai sampai 1.398 km dan areal laut seluas 30.364,59 km² memiliki potensi perikanan yang terbilang besar dan tersebar di beberapa perairan pulau-pulau kecil dan besar (BPS, 2023).

Sungai Kakap adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, merupakan wilayah pesisir dengan penduduk yang bermatapencaharian bernelayan dan berkebun. Muara kakap adalah salah satu stasiun atau dermaga kapal nelayan di pesisir tersebut, yang banyak disinggahi kapal nelayan saat gelombang tinggi, seperti tampak dalam gambar 1. Dalam 10 tahun terakhir ekosistem laut dan sumber daya perikanan mengalami penurunan kualitas sebagai dampak dari perubahan cuaca ekstrim. Peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi dan pelaporan berbagai spesies ikan. Beberapa spesies mungkin bermigrasi ke perairan yang lebih dingin, sementara yang lain mungkin mengalami penurunan populasi. Pengelolaan perikanan berkelanjutan harus mempertimbangkan perubahan dalam perencanaan kuota dan penangkapan ikan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produktivitas fitoplankton, yang merupakan dasar dari rantai makanan laut. Penurunan produktivitas primer dapat mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan dan hewan laut lainnya, sehingga mengakibatkan penurunan stok ikan. Pengelolaan berkelanjutan harus mempertimbangkan perubahan dalam rantai makanan ini.



Gambar 1. Pelabuhan Nelayan di Muara Sungai Kakap

Di sisi lain, terdapat beberapa tindakan masyarakat pesisir yang menyalahi aturan dalam pengelolaan berkelanjutan tersebut, di antaranya adalah penangkapan ikan berlebih (Overfishing) sehingga mengakibatkan penurunan stok ikan, eksploitasi biota laut yang hampir punah seperti ikan hiu dan pari, penangkapan kapal nelayan tanpa izin terutama di area terlarang, atau dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang (Damanik, K.G. 2018). Kondisi-kondisi akibat dari tindakan tersebut sangat berpotensi menurunkan kualitas perairan dan menurunnya tangkapan nelayan khususnya nelayan lokal yang beroperasi di perairan sekitar Kakap. Salah satu usaha untuk mengurangi tindakan yang tidak mendukung pengelolaan potensi perikanan berkelanjutan adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat pesisir Kakap.

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk memperkenalkan sejak dini kepada remaja sekolah tentang urgensi pemanfaatan potensi perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas tangkapan nelayan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan ini bermitra dengan remaja siswa SMPN 8 Kubu Raya, dengan harapan bahwa remaja yang telah teredukasi hukum tersebut dapat menjadi agen perubahan baik di keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat pesisir. Kegiatan diikuti oleh 30 orang siswa SMPN 8 Kubu Raya, dan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi ilmiah terkait topik hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan potensi perikanan laut berkelanjutan.

II. METODE

Kegiatan PKM Edukasi Hukum tentang Pengelolaan Perikanan Laut Berkelanjutan di Pesisir Kakap dilaksanakan dalam 3 tahap kegiatan antara lain persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dapat digambarkan secara skematis berikut (gambar 2).



Gambar 2. Skema Tahapan Kegiatan PKM

Tahapan pertama dari kegiatan PKM ini adalah persiapan kegiatan yang meliputi rapat konsolidasi antar tim pelaksana kegiatan dengan agenda penentuan lokasi dan jadwal kegiatan, serta pengantaran undangan dan permohonan izin ke sekolah. Tahapan kedua adalah pelaksanaan kegiatan PKM pada hari Sabtu 18 Mei 2024, yang dihadiri oleh 30 orang siswa kelas 2 terglolong remaja, dari SMPN 8 Kubu Raya. Tahapan terakhir adalah monitoring selama kegiatan dan evaluasi dengan pemberian kuisioner kepada peserta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sungai Kakap adalah salah satu pesisir di Kubu Raya Kalimantan Barat memiliki potensi perikanan yang signifikan. Kecamatan Sungai Kakap memiliki berbagai spesies ikan air tawar dan payau yang bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan baung, ikan patin, ikan gabus, ikan nila, dan udang.

Keanekaragaman ini menciptakan peluang bagi aktivitas perikanan yang beragam. Banyak penduduk lokal yang bergantung pada penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama. Sungai dan perairan payau di sekitar Kecamatan Sungai Kakap menyediakan sumber daya ikan yang cukup berlimpah. Metode penangkapan tradisional seperti penggunaan jala, jaring, dan pancing masih banyak digunakan.

Meskipun potensi perikanan di Kecamatan Sungai Kakap besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, degradasi lingkungan oleh adanya pencemaran udara dan perusak habitat, seperti mangrove dan terumbu karang, dapat mengancam kepunahan sumber daya perikanan. Penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, seperti bom ikan, racun, atau alat tangkap yang tidak menghalangi seperti jaring pukat harimau. Alat tangkap ini dapat merusak habitat laut dan menangkap ikan yang tidak diinginkan (bycatch). Penangkapan ikan yang dilindungi oleh hukum karena status konservasinya yang rentan atau terancam punah. Termasuk di dalamnya adalah penangkapan spesies yang memiliki nilai penting bagi ekosistem lokal.

Edukasi hukum kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu dilaksanakan karena edukasi kesadaran hukum masyarakat kepada pesisir memiliki peran penting dalam usaha pengelolaan perikanan berkelanjutan. Masyarakat pesisir yang memahami hukum dan regulasi terkait perikanan akan cenderung mematuhi aturan tersebut. Kepatuhan terhadap kuota penangkapan, ukuran ikan minimum, dan kawasan perlindungan laut membantu menjaga kelestarian sumber daya ikan. Edukasi kesadaran hukum dapat membantu mengurangi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Masyarakat yang sadar hukum lebih memahami dampak negatif dari tindakan ilegal ini terhadap ekosistem laut dan ekonomi mereka sendiri. Masyarakat yang teredukasi akan lebih menghargai pentingnya habitat laut seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun. Mereka akan lebih berperan aktif dalam menjaga dan memulihkan habitat-habitat ini, yang penting bagi kelangsungan hidup berbagai spesies ikan. Edukasi hukum yang menyangkut perikanan juga mencakup informasi tentang hak-hak dan kewajiban nelayan, akses ke pasar yang legal, dan manfaat jangka panjang dari praktik perikanan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dengan memastikan bahwa sumber daya perikanan tetap tersedia dan sehat.

Mitra kegiatan PKM Edukasi hukum ini adalah remaja siswa SMPN 8 Kubu Raya yang berlokasi di wilayah pesisir Kakap Kabupaten Kubu Raya. Edukasi pada anak remaja usia sekolah ini merupakan langkah penting untuk membentuk generasi yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Pendidikan hukum membantu membentuk karakter anak sejak dini, mengajarkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan etika (Lestari, 2013). Anak-anak yang memahami hukum cenderung tumbuh menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum, anak lebih mungkin menghindari perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pendidikan hukum dapat berfungsi sebagai pencegahan dini terhadap tindakan kriminal atau perilaku antisosial. Pendidikan hukum mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi sekaligus mendorong anak untuk berpikir kritis dan analitis (Yulianto *et al.*, 2011). Mereka belajar menilai situasi berdasarkan aturan dan hukum, yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan hukum juga dapat mencakup peraturan tentang perlindungan

lingkungan termasuk pemanfaatan potensi perikanan dan terlibat langsung dalam praktik berkelanjutan dan peduli terhadap kelestarian alam sejak usia dini (Rahayu *et al.*, 2022).

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang siswa yang dilaksanakan dengan metode ceramah edukatif seperti tampak pada gambar 3. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam ceramah edukatif oleh tim pelaksana adalah Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan memerlukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana sumber daya ini dapat digunakan tanpa merusak ekosistem laut dan mengancam ekosistem dalam jangka panjang (Anggraeni *et al.*, 2023). Berikut adalah beberapa aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan antara lain adalah pemberlakuan Kuota Penangkapan Ikan (Total Allowable Catch - TAC) di mana pemerintah menetapkan kuota penangkapan ikan untuk berbagai spesies berdasarkan data ilmiah tentang stok ikan. Ini bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan memastikan populasi ikan tetap pada tingkat yang sehat di sepanjang waktu. Peraturan tentang sistem perizinan juga ditegaskan untuk mengatur siapa yang dapat menangkap ikan, jenis alat tangkap yang digunakan, dan area penangkapan (Edorita, 2019). Aturan yang mengatur penggunaan alat tangkap ikan, seperti larangan penggunaan jaring pukat harimau yang merusak habitat dasar laut dan menyebabkan tangkapan sampingan (bycatch) yang tinggi (Aryanto, 2017). Lisensi ini membantu memastikan pengendalian jumlah nelayan yang beroperasi dan melakukan penangkapan yang berkelanjutan, sekaligus melindungi nelayan lokal di pesisir dalam ketersediaan hasil perikanan yang dapat dikonsumsi oleh mereka (Sudjana, 2016).



Gambar 3. Kegiatan Edukasi Hukum Pengelolaan Kawasan Perairan Berkelanjutan Pada Anak Usia Sekolah



Gambar 4. Aktivitas Nelayan di Laut

Untuk berbagai spesies ikan, dibuat aturan musim penangkapan agar memberi waktu bagi ikan untuk berkembang biak dan meregenerasi populasi mereka. Penutupan musim tertentu juga membantu mengurangi tekanan penangkapan selama periode kritis. Beberapa spesies ikan yang terancam punah juga mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak ditangkap, sebagai usaha pencegahan kepunahan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Untuk memudahkan pembatasan aktivitas penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya laut, di Departemen Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) (tabel 1).

Tabel 1. Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kalimantan Barat

No	Kawasan Konservasi	Luasan (m ²)
1	Kawasan Konservasi Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63
2	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pulau Randayan dan Perairan sekitarnya	61.654,59
3	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kendawangan dan Perairan sekitarnya	164.595,74
4	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kubu Raya dan Perairan sekitarnya	134.409,14
5	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Paloh dan Perairan sekitarnya	168.291,06

Pengetahuan tentang hukum lingkungan dan perairan berkelanjutan kepada anak usia sekolah atau remaja ini sangat penting dilakukan untuk menyiapkan anak-anak dalam berkontribusi secara positif pada upaya konservasi dan perlindungan ekosistem laut di masa depan (Batubara, 2019). Mereka dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam komunitas mereka, keluarga dan lingkungan masyarakat yang lebih luas, mempromosikan keadilan sosial, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pendidikan hukum pada anak usia sekolah juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs), khususnya dalam hal menjaga ekosistem laut (SDG 14). Dengan membekali anak-anak dengan pengetahuan dan kesadaran hukum yang kuat, kita tidak hanya terus menjelajahi sumber daya perairan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama. Secara keseluruhan, pendidikan hukum tentang pengelolaan kawasan perairan berkelanjutan adalah investasi penting yang membawa dampak jangka panjang, baik bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dengan pemberian kuis kepada peserta di awal dan di akhir kegiatan menunjukkan terjadinya peningkatan persentase peserta dalam memahami aturan hukum yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hasil test dapat tersebut dapat diuraikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 2. Hasil Kuis (Pre Test dan Post Test)

Uraian Pertanyaan	Pre Test (%)		Post Test (%)	
	Tahu	Tidak	Tahu	Tidak
Peraturan hukum terkait pemanfaatan sumber daya laut sangat penting untuk dipahami?	20	80	90	10
Masyarakat sangat penting untuk mendapatkan edukasi hukum terkait pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan	30	70	100	-
Dalam usaha melakukan pengawasan terhadap pengelolaan potensi perikanan di Indonesia, dibuat beberapa kawasan konservasi	10	90	100	-

Uraian Pertanyaan	Pre Test (%)		Post Test (%)	
	Tahu	Tidak	Tahu	Tidak
Pembatasan hasil tangkapan dan alat tangkap nelayan sangat penting dalam menjaga potensi perikanan laut agar dapat berkelanjutan	10	90	100	-

IV. KESIMPULAN

Edukasi hukum tentang pengelolaan kawasan perairan berkelanjutan bagi anak usia sekolah merupakan langkah strategis yang krusial untuk membentuk generasi yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam sejak dini mengenai aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut, anak-anak dapat mengembangkan karakter yang bertanggung jawab, etis, dan peka terhadap isu-isu lingkungan. Selain itu, edukasi hukum ini selain akan membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka sebagai individu dalam masyarakat, tetapi juga mendorong keterampilan berpikir kritis dan analitis. Anak-anak yang memahami konsekuensi dari tindakan melanggar hukum cenderung menghindari perilaku yang merugikan dan lebih mematuhi aturan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi kegiatan PKM Edukasi hukum pengelolaan kawasan perairan berkelanjutan yang dilakukan melalui pemberian kuisioner (pre test dan post test) kepada peserta siswa SMPN 8 Kubu Raya terjadinya peningkatan peserta dalam memahami materi kegiatan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R.P., Ananda, A.A.S., & Haryanto, N.F. 2023. Gagasan Pengadilan Maritim Dalam Tata Hukum Indonesia: Integrasi Pengadilan Perikanan Dan Mahkamah Pelayaran Sebagai Pembaharuan Hukum, 12 (3).
- Aryanto, H. 2017. Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut terhadap Bahaya Ilegal Fishing, *Lex Jurnalica*, 14 (3).
- Badan Pusat Statistik. 2023. Kalimantan Barat dalam Angka.
- Batubara, G.T., 2019. Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini, *Jurnal Litigasi*, 20 (1).
- Damanik, K.G. 2018. Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang (Studi Kasus Kecelakaan Kapal Mv. Caledonian Sky di Raja Ampat). *Law Review*, 17 (3).
- Dharmawan, N.K.S., & Sarjana, M. 2016. Pengaturan Biota Bawah Laut Dan Keanekaragaman Hayati Dalam Dimensi Sustainable Tourism. Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek).
- Edorita, W. 2019. Keberlanjutan Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berbasis Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Alat Tangkap Perikanan, *Riau Law Journal*, 3 (2).
- Lestari, M.M. 2013. Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2).
- Rahayu, W., Sari, D.W., Nuraya, T., & Harfinda, E.M. 2022. Pengenalan Biota Laut Dilindungi Di Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat. *Jurnal Bina Bahari*, 1 (2).
- Sudjana. 2016. Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25 (2).
- Yulianto, I., Wiryawan, B., & Mukminin, A., 2011. Tinjauan Hukum Dan Kebijakan Kawasan Konservasi Laut (Kkl) Mukim Ie Meulee, Kota Sabang: Suatu Implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Pulau Kecil, *Marine Fisheries*, 2 (1).